



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN  
TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH  
BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**RIO ALDI SAPUTRA**  
**NIM.11773100332**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
PEKANBARU**

**2021**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN  
TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH  
BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT BANK BNI SYARIAH  
KANTOR CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Ak) Pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**RIO ALDI SAPUTRA**  
**NIM.11773100332**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** : RIO ALDI SAPUTRA  
**NIM** : 11773100332  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : SYARIAH  
**JUDUL** : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANANQISAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU.  
**Hari, Tanggal Ujian** : Senin, 19 Juli 2021

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI

Nasrullah Djamil, SE, M.Si, AK, CA  
NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. Dony Martias, SE, MM  
NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II

Ferizal Rachmad, SE, MM  
NIP. 19750216 201411 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**NAMA** : RIO ALDI SAPUTRA  
**NIM** : 11773100332  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI SI  
**JUDUL** : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU

Hari, Tanggal Ujian : Senin, 19 Juli 2021

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

**Dr. NANDA SURYADI, SE., ME**  
 NIK. 130 717 055

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

**Dr. H. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA**  
 NIP. 19780808 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU**

**Oleh : Rio Aldi Saputra**  
**NIM: 11773100332**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Take Over akad Musyarakah Mutanaqisah berdasarkan PSAK 106 pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi musyarakah berupa wawancara dan observasi data sekunder yang di peroleh dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru kemudian membandingkannya dengan PSAK 106. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa Perlakuan Akuntansi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru terhadap pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah meliputi realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan telah sesuai berdasarkan PSAK No. 106. Namun untuk penyajian belum sesuai dengan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan Musyarakah yang dimana Pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing nasabah sebagai piutang Musyarakah.*

**Kata Kunci:** Take Over, Musyarakah Mutanaqisah, PSAK No.106, Pengakuan dan Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT FOR FINANCING TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH BASED ON PSAK 106 AT PT BANK BNI SYARIAH, PEKANBARU BRANCH OFFICE**

**Oleh: Rio Aldi Saputra**  
**NIM: 11773100332**

*This study aims to determine the Accounting Treatment of Take Over Financing for Musyarakah Mutanaqisah contracts based on PSAK 106 at PT. BNI Syariah Pekanbaru Branch Office. This study uses descriptive qualitative methods, namely by analyzing data related to the recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka accounting in the form of interviews and secondary data observations obtained from PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru Branch Office then compared it with PSAK 106. Based on the results of the study, it was concluded that the Accounting Treatment at PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru Branch Office for Musyarakah Mutanaqishah financing includes the realization of financing until the end of the financing which consists of recognition, measurement, and disclosure according to PSAK No. 106. However, the presentation is not in accordance with PSAK 106, which is related to the presentation of Musyarakah financing in which PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru Branch Office presents cash given at the time of delivery of funds by each customer as Musyarakah receivables.*

**Keywords: Take Over, Musyarakah Mutanaqisah, PSAK No.106, Confession and Measurement, Disclosure, Presentation**

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan atas nikmat yang Allah SWT berikan, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Take Over Akad Musyarakah Mutanaqisah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BANK BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru**”.Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan skripsi, penulis banyak diberikan bimbingan, arahan dan dorongan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska beserta Staff.
2. Ibu Dr.Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Nasrullah Djamil. SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE., ME selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Desrir Miftah, SE.MM.Ak selaku Penasehat Akademik dan dosen konsultasi yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
6. Staf program studi akuntansi dan staf akademik yang telah banyak membantu pengelolaan administrasi di kampus.
7. Bapak dan ibu Dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Terima kasih atas bantuannya
8. Ayahanda Ali Akbar dan Ibunda Asnawati serta nenek tercinta dan tersayang, yang telah memberikan doa disetiap sujud meminta yang terbaik kepada-Nya untuk para buah hatinya, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Aamiin.
9. Abang dan kakakku, Bg Oki, Bg Andi, Bg Andri, Kak indah yang teramat saya sayangi, yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.
10. Sahabat KKN Desa Kubang Jaya 2020 , Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Bela, Fara, Devi, Nur, Reski, Ayu, Rocky. Terima kasih untuk 1,5 bulan kebersamaan dan perjuangannya
11. Teman-teman Akuntansi B 2017, terima kasih untuk kebersamaan dan perjuangannya selama 5 semester. Teman-teman Konsentrasi Akuntansi





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah A, terima kasih untuk kebersamaan dan perjuangannya selama 2 semester.

12. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2021

Rio Aldi Saputra



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	12
2.1.2 Fungsi Bank Syariah.....	13
2.1.3 Tujuan Bank Syariah .....	15
2.2 Akuntansi Musyarakah Menurut Pernyataan Standar Akuntansi PSAK No. 106.....	16
2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah Pada PSAK No. 106 ....	19
2.2.2 Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106 .....	24
2.2.3 Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK No. 106.....	24
2.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	25
2.4 Jenis Akad Bank Syariah.....	26
2.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	32
2.6 Pengertian Pembiayaan .....	36
2.7 Tujuan Pembiayaan.....	37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pengertian Take Over.....	38
2.9 Rukun dan Syarat <i>Take Over</i> (Hiwalah) .....	47
2.10 Pengertian akad Musyarakah Mutanaqisah .....	51
2.11 Tujuan Akad Musyarakah Mutanaqisah .....	52
2.12 Landasan Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah .....	52
2.13 Rukun dan syarat akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	59
2.14 Skema Pembiayaan Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	59
2.15 Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> ..	63
2.16 Kerangka Konseptual .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
3.1 Objek Penelitian .....	62
3.2 Jenis Penelitian .....	62
3.3 Sumber Data .....	63
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.5 Teknik Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	69
4.1.1 Dekripsi Data Umum.....	69
4.1.2 Dekripsi Data Khusus.....	91
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	102
4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.	102
4.2.2 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. ....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>115</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Hambatan.....	116
5.3 Saran.....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
-----------------------------	--

<b>LAMPIRAN .....</b>	
-----------------------	--



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis-jenis Akad Pembiayaan Pada PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru. ....	4
Tabel II.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	31
Tabel IV.1 Angsuran Pembiayaan Musyarakah.....	93
Table IV.2 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 106 Pada PT.Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru .....	107

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema hiwalah.....	46
Gambar 2.2 Skema 1 Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah .....	56
Gambar 2.3 Skema 2 Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah .....	58
Gambar 2.4 Musyarakah Mutanaqisah .....	59
Gambar 4.1 Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah .....	91





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum Islam.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki misi dan metodologi yang eksklusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Yang dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan Allah SWT. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan Alqur'an dan Hadist yang harus diikuti oleh manusia. Bank Syariah hadir di Indonesia untuk memenuhi harapan umat menerapkan ekonomi yang berkeadilan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) sebagai salah satu asas transaksi syariah esensinya adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

PT. BNI Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia merupakan bank yang pertama yang didirikan dan dimiliki oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Indonesia. Menyusul penunjukan *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda sebagai Bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Tahun 1992, status Hukum dan nama BNI berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran perdana disaham pasar modal pada tahun 1996. Baru setelah itu PT. BNI mendirikan anak perusahaan yaitu PT. BNI Syariah. Yang resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada 19 Juni 2010. Sebelumnya, selama 10 tahun BNI Syariah merupakan unit usaha Bank BNI yang menawarkan produk-produk perbankan Syariah kepada nasabah.

Penghasilan paling terbesar Bank BNI Syariah saat ini adalah pada produk pembiayaan terutama pembiayaan dengan segmen Kecil, Menengah dan Besar. PT Bank BNI Syariah saat ini mengelola pembiayaan kecil untuk segmentasi Mikro dan menengah (UMKM). Salah satu pola pembiayaan PT Bank BNI Syariah adalah *Musyarakah Mutanaqishah*.

*Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *Musyarakah*. *Musyarakah Mutanaqishah* dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah 'inan*, dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu *syarik* (mitra) yaitu Bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain yaitu Nasabah.

*Musarakah mutanaqisah* merupakan akad hasil kreasi ulama dan pengusaha yang memadukan nilai musarakah yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang demikian cepat.

Menurut fatwa DSN MUI No.73 tahun 2008, diberlakukan adanya akad turunan dari musarakah, yakni akad *Musarakah Mutanaqishah*. *Musarakah Mutanaqishah* yang dikenal dengan istilah MMQ adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

Pada konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan beberapa pembiayaan kepada nasabah, konsumtif, modal kerja, maupun kerja sama. Pembiayaan yang di implementasikan dalam kerja sama, modal kerja dan juga pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dimana sebelumnya nasabah mempunyai pinjaman di bank lain terutama di bank konvensional.

Pembiayaan dengan mekanisme *take over* dipandang dalam bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat terlebih setelah berkembangnya Bank syariah, bank syariah menawarkan kelebihan tersendiri sehingga penawaran pembiayaan *take over* oleh bank syariah kepada nasabah – nasabah yang dalam rangka memperbesar *market share* bank syariah sesuai target yang ditetapkan Bank Indonesia.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andri Altri Putra SME AO pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, produk yang menggunakan akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru antara lain Produk Pembiayaan Take Over. Take over adalah salah satu bentuk pelayanan Bank Syariah dalam membantu masyarakat atau nasabah mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.

**Tabel 1.1 Jenis-jenis Akad Pembiayaan Pada PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru.**

No	Category	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Murabahah	1259	1271	1177	1193	1306
2	Ijarah Multijasa Konsumtif	161	122	48	9	14
3	Modal kerja Syariah Mudharabah Mudharabah Mutlaqah	1	2	49	38	26
4	Modal kerja Syariah Musyarakah	22	24	32	41	49
5	Musyarakah Mutanaqisah	0	0	1	2	8

**Sumber: PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru (2019)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari data diatas diperoleh ketika peneliti melakukan observasi di Bank BNI Syariah KC Pekanbaru ketika dan melakukan wawancara tentang jenis-jenis akad pembiayaan yang ada di perusahaan tsb. Dari data diatas akad yang tersalurkan ada lima yaitu, *Murabahah* , *Ijarah Multijasa Konsumtif*, *Modal kerja Syariah Mudharabah Mudharabah Mutlaqah*, *Modal kerja Syariah Musyarakah* , *Musyarakah Mutanaqisah*. Jelas bahwa Penyaluran pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* memiliki perkembangan yang baik oleh LKS, tetapi pembiayaan akad ini belum banyak yang di pahami oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Pak Andri Altri Putra Selaku SME AO pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru mengenai Perkembangan akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* pada produk pembiayaan memiliki perkembangan yang baik dikalangan nasabah namun terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan akad *Musyarakah Mutanaqisah* diantaranya :

1. Nasabah belum mengetahui tentang akad *Musyarakah Mutanaqisah* maupun produk pembiayaannya sehingga nasabah kurang mengetahui tentang pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dan pembiayaan yang lebih sering digunakan di Bank BNI Syariah yaitu pembiayaan *Murabahah*.
2. Kurangnya promosi dalam mempromosikan Pembiayaan Take over dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* sehingga masyarakat belum mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada di pembiayaan Take Over dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah*.
3. Masih sangat sedikit nasabah yang melakukan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dikarenakan pembiayaan Take Over dengan akad *Musyarakah*



*Muatanqisah* termasuk akad baru di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sehingga jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Take Over dengan akad *musyarakah mutanaqisah* masih sedikit.

Selain itu PT. Bank BNI Syariah juga memberikan pembiayaan *take over* dengan menawarkan margin yang cukup kompetitif dalam mencari minat nasabah, sebagai contoh studi kasus :

1. Pak Rahmat mempunyai kredit kepemilikan rumah pada Bank Konvensional XX. Jangka waktu 10 tahun, plafon pembiayaan 100.000.000,- dan bunga 14% pertahun. Setelah kredit pada Bank Konvensional tersebut berjalan selama 2 tahun, Pak Rahmat ingin mengalih hutangnya ke PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru karena merasakan bahwa setelah berjalan selama dua tahun tersebut hutang pokoknya belum terbayar. Setelah dilakukan preview oleh PT. Bank BNI Syariah Pusat, Pak Rahman telah memenuhi persyaratan ( *Bankable* ) sehingga permohonannya disetujui dan kredit di bank lama dapat ditake over ke bank yang baru yakni, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Permasalahan yang timbul ketika debitur yaitu nasabah pembiayaan *take over* tidak mengetahui system, fatwa dan akad yang digunakan pada pembiyaan *take over* sehingga tetap mengasumsikan pengambilan margin oleh Bank disamakan dengan Bank Konvensional.
2. kasus kedua, Salah satu nasabah PT Bank BNI Syariah bernama PT KMA. Merupakan perusahaan yang memiliki usaha SPBU pada 2 tempat yaitu di Kota Pekanbaru dan Kota Pangkalan Kerinci Pelalawan. PT KMA memiliki fasilitas di Bank Syariah A berbentuk Pembiayaan Dana Berputar (PDB)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebesar Rp. 1.5 Milyar. Pembiayaan dana berputar memiliki skema *Musarakah* dimana PT KMA memperoleh Modal Kerja dari Bank Syariah A untuk membeli persediaan Bahan Bakar Minyak pada 2 SPBU. Pada tahun 2019 PT KMS berencana akan membangun sebuah SPBU lagi di Kota Pekanbaru. Mengajukan *top up* yang akan digunakan untuk membuat SPBU baru sebesar Rp. 1,5 M. maka total plafond adalah sebesar Rp. 3 M. Pengajuan PT KMA di tolak oleh Bank Syariah A sehingga PT KMS memilih untuk memindahkan pembiayaan tersebut ke Bank BNI Syariah.

Setelah PT Bank BNI Syariah menganalisa PT KMA baik secara kualitatif dan kuantitatif maka PT KMA mendapatkan persetujuan Take Over pembiayaan dari Bank BNI Syariah dengan total Rp. 3 M. 1,5 Milyar digunakan untuk take over pembiayaan PDB dari Bank Syariah A dan 1,5 Milyar lagi digunakan untuk membangun SPBU baru. PT Bank BNI Syariah menggunakan akad MMQ (*Musarakah Mutanaqisah*). Hal ini karena PT KMA memiliki asset SPBU yang telah dinilai oleh KJPP Independen yang bekerja sama dengan BNI Syariah sebesar Rp. 7 Milyar. Maksimal pembiayaan MMQ adalah 80% dari nilai asset setelah di Appraisal. Jika dihitung 80% dari nilai asset maka PT KMA mendapatkan maksimal 5,6 M plafond pembiayaan dalam hal ini PT KMA menggunakan sebesar 3 M atau sebesar 53,5% dari maksimal plafond. Dalam hal ini PT KMA tidak menyediakan sebetuk dana apapun. PT KMA hanya menyediakan agunan yang bernilai agar PT Bank BNI Syariah dapat melunasi hutang di Bank Syariah A. Pada PSAK 106 pada karakteristik point 5 mengatakan bahwa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“para mitra (syarik) bersama- sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.”

*Musyarakah Mutanaqisah* merupakan akad turunan dari akad *musyarakah* Dalam Fatwa DSN MUI NO.73/DSN-MUI/XI/2008 *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam PSAK Akad *Musyarakah Mutanaqisah* belum diatur sehingga akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini masih merujuk pada PSAK 106 akad *Musyarakah*.

Acuan penelitian terdiri dari, Penelitian dari Sarwedhie dan Suprayogi (2015). “Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : Kpr IB pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya) hasil penelitiannya Setelah diuji, perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqisah* di bank Muamalat Indonesia cabang Darmo Surabaya dan juga dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pusat sudah sesuai dengan PSAK No 106 dan Fatwa DSN No 73 khususnya perlakuan akuntansi pada proses mengangsur dan ketika akad berakhir.

Penelitian dari Slamet Pramudi Ananta, 2013 “Implementasi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Berdasarkan PSAK NO. 106 dan 107” berdasarkan hasil menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi yang dipakai oleh Bank Muamalat dari proses pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian sesuai dengan PSAK 106 dan 107 dan peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi pembiayaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyarakah Mutanaqishah pada BANK Muamalat Cabang Jember telah sesuai dan menggunakan PSAK 106 dan 107 dalam menyajikan laporan keuangan.

Dalam pencatatan Akuntansi PT Bank BNI Syariah terhadap *Musyarakah Mutanaqishah* masih merujuk pada akad *Musyarakah* yang di atur dalam PSAK 106. Untuk mengetahui perlakuan Akuntansi terhadap pembiayaan take over pada akad *Musyarakah Mutanaqishah*, peneliti mengambil studi kasus pada PT BANK BNI Syariah kantor cabang Pekanbaru. Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian, tentang akad *musyarakah* oleh karena itu kami mencoba mengevaluasi apakah PSAK 106 memiliki kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap penerapan pembiayaan take over dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BNI Syariah kantor Cabang pekanbaru. Sehubungan dengan uraian di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN TAKE OVER AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU** “

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Take Over Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* berdasarkan PSAK 106 Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru ?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Take Over* dengan akad *Musarakah Mutanaqisah* berdasarkan PSAK 106 pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan yaitu:

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang pastinya berguna di waktu yang akan datang.

#### 2. Bagi Pihak PT.Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Hasil penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sebagai masukan atau referensi untuk meningkatkan kualitas produk *Musarakah Mutanaqisah*.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta menjadi referensi bahan pada penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

## BAB I : PENDAHULUAN





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian untuk mendukung pembahasan dalam masalah penelitian.

## **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian sumber data yang berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjabarkan tentang gambaran perusahaan dan hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisis tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran saran bagi peneliti selanjutnya.



## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Abdullah (24:2014).

Bank syari'ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'a dalam versi bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syari'ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam. Wangsawidjaya (15:2012).

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tatacara beroperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Muamalat” adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat. Sumar'in (49;2012).

Pengertian bank syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan : “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).”

Dalam menjalankan perinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk pelayanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

### 2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME “*Small Medium Enterprise*”), agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia. Artinya Pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM. Jangan sampai hanya perusahaan korporat yang lebih diperhatikan. Keberadaan bank harus bermanfaat dan harus



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dirasakan langsung oleh siapa saja baik oleh deposan maupun debitur, pelaku bisnis, karyawan. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih, kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Untuk nasabah funding (yang mempunyai dana lebih) dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan : giro, tabungan, atau deposito. Masing-masing mempunyai spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya. Tabungan, giro dan deposito merupakan produk funding yang sangat konvensional. Sejak dahulu sampai dengan sekarang produknya masih tetap ada dan masih berjalan, mengingat produk konvensional tersebut masih dibutuhkan sampai dengan saat ini.

Menurut Muhammad mengemukakan secara sistematis beberapa fungsi perbankan Islam. Fungsi-fungsi yang dimaksud tersebut yaitu:

- a) Membantu pembangunan Negara Islam dengan memudahkan investasi modal untuk tujuan produksi.
- b) Meningkatkan investasi swasta asing dengan memakai jaminan peran serta dalam pinjaman investasi lain yang dilakukan oleh investor swasta.
- c) Meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional jangka panjang yang berimbang, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk pembangunan sumber daya produksi para anggota.
- d) Mengatur pinjaman yang dijamin, dalam hubungannya dengan pinjaman internasional atau melalui saluran lain melalui proyek lebih berguna dan mendesak dapat dihadapi terlebih dahulu. Memberi saran teknik tentang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang berhubungan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pinjaman kepada para ahli setempat yang memenuhi syarat dalam menghadapi teknik khusus.

- e) Memberikan jasa baik dalam menyelesaikan persengketaan ekonomi di kalangan negara-negara Islam, seperti yang kita dapati dalam kasus persengketaan air antara India dan Pakistan yang diselesaikan oleh bank dunia pada tahun 1960.

### 2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Muhammad mengemukakan secara sistematis beberapa tujuan bank syariah. Tujuan yang dimaksud tersebut yaitu:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan bank agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi umat.
- b) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok-kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwiraswasta).
- c) Menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dan dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menanggulangi mengatasi kemiskinan pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara berkembang. Upaya bank Islam dalam mengatasi kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol bersifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan modal kerja dan program pembinaan konsumen, program pembinaan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e) Menjaga stabilitas ekonomi moneter pemerintah Menyelamatkan Islam yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

## 2.2 Akuntansi Musyarakah Menurut Pernyataan Standar Akuntansi PSAK

### No. 106

#### PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.

#### 106AKUNTANSI MUSYARAKAH

*Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar.*

*Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).*

#### PENDAHULUAN

##### Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*.

##### Ruang Lingkup



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah*.
3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *musyarakah*.

#### Definisi

4. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

***Musyarakah permanen*** adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

***Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)*** adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

**Mitra aktif** adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

**Mitra pasif** adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

#### Karakteristik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
6. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.
7. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:
  - a) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
  - b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
8. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
9. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).





10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
12. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

### 2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah Pada PSAK No. 106

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha Musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha Musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha Musyarakah tersebut (PSAK No. 106, par 13).

#### Pada saat akad

1. Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha Musyarakah (PSAK No. 106, par 14).
2. Pengukuran Investasi Musyarakah
  - a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah diserahkan: dan
  - b. Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset no-kas, maka selisish tersebut diakui sebagai selisihpenilaian aset Musyarakah dalam ekuitas. Selisish

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- penilaian aset Musyarakah tersebut diamortisasikan selama masa akad Musyarakah (PSAK No. 106, par 15).
3. Aset non-kas Musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
- a) Penyusutan yang dihitung dengan modal biaya historis: ditambah dengan Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha Musyarakah (PSAK No. 106, par 16).
4. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas Musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru (PSAK No.106, par 17).
5. Biaya yang terjadi akibat akad Musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi Musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra Musyarakah (PSAK No. 106, par 18).
6. Penerimaan dana Musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi Musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar :
- a) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif (PSAK No, 106 par 19).

### Selama akad

1. Bagian mitra aktif atas investasi Musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha Musyarakah pada asal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau
- b) Nilai wajar aset Musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha Musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (PSAK No. 106 par 20).
2. Bagian mitra aktif atas investasi Musyarakah menurun (dengan pengembalian dan mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer. PSAK No. 106 par 21).
3. Pada saat akad diakhiri, investasi Musyarakah yang belum dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK No. 106, par 22).

#### Pengakuan hasil usaha

1. Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban (PSAK No. 106, par 23)
2. Kerugian investasi Musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset Musyarakah (PSAK No. 106, par 24).
3. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola aktif Musyarakah (PSAK No. 106, par 25).
4. Pengakuan pendapatan usaha Musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pengelola usaha yang dilakukan



secara terpisah (PSAK No. 106, par 26).

### **Akuntansi untuk mitra pasif antara lain:**

#### **Pada saat akad**

1. Investasi Musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. (PSAK No. 106, par 27)
2. Pengukuran investasi Musyarakah:
  - a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan: dan
  - b) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan dinilai tercatat aset non-kas maka selisih tersebut diakui sebagai:
    - i. keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama masa akad atau
    - ii. kerugian pada saat terjadinya. (PSAK No. 106, part 28)
3. Investasi Musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). (PSAK 106, Par 29).
4. Biaya yang terjadi akibat akad Musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi Musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. (PSAK No.106, par 30)
5. Bagian mitra pasif atas investasi Musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
  - a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Nilai wajar aset Musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha Musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106 par 31)

6. Bagian mitra pasif atas investasi Musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 32)

**Akhir akad**

1. Pada saat akad diakhiri, investasi Musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK No. 106, par 33)

**Pengakuan hasil usaha**

1. Pendapatan usaha investasi Musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi Musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK No. 106, par 34).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.2 Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106

1. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha Musyarakah dalam laporan keuangan:
  - a) Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi Musyarakah.
  - b) Aset Musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk
  - c) Selisih penilaian aset Musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas . (PSAK No. 106, par 35).
2. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha Musyarakah dalam laporan keuangan
  - a) Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi Musyarakah.
  - b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah. (PSAK No. 106, par 36).

### 2.2.3 Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK No. 106

1. Mitra mengungkapkan hal – hal yang terkait transaksi musyarakah tetatpi tidak terbatas, pada :
  - a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti, porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain – lain
  - b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif dan



- c) Pengungkapan yang dilakukan selama di lembaga keuangan syariah (PSAK No. 106, par 37).

### 2.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa dibidang syariah. Bank Syariah pada dasarnya menerapkan prinsip Bagi Hasil dimana dalam prinsip ini:

- a) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi;
- b) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- c) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
- d) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- e) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan.

Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak; adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu:

- a) **Shiddiq**, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai pengelolaan diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat terlarang (*haram*).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) **Tabligh**, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah
- c) **Amanah**, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibu maal*) sehingga timbul rasa percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudaharib*).
- d) **Fathanah**, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

## 2.4 Jenis Akad Bank Syariah

### a) Pola titipan

#### 1. Wadi'ah

*Wadi'ah* itu diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *Wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Adapun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil dibolehkannya melakukan transaksi wadi'ah adalah ayat dan Hadits sebagai berikut: firman Allah Swt. yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

artinya : “Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya” (QR. An-Nisa’ : 58)

Akad Wadi'ah yad Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

a) Titipan Wadi'ah yad Amanah

Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah/kepercayaan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya.

b) Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Wadi'ah yad Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Dalam aplikasi perbankan, akad Wadi'ah yad Dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.

b) Pola pinjaman

1. Al-qardh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Al-qardh* secara bahasa berarti *qath*“(potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Dasar dari al-Qur’an adalah firman Allah SWT:

**مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعَافًا كَثِيرَةً**

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyalurkan sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema peminjamannya disebut *qardhul hasan*.

#### c) Pola bagi hasil

##### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Dasar Hukum Mudharabah dari Al-Qur'an surat Al-Muzammil (73) ayat 20 sebagai berikut :

**...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ..." (al-Muzzammil: 20)

### Jenis-jenis Mudharabah

#### a. Mudharabah Muthlaqah

*Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis.

#### b. Mudharabah Muqayyadah.

*Mudharabah Muqayyadah*, yaitu akad *Mudharabah* dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

### 2. Pengertian Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam ayat lain Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ء وَإِنْ كَثُرَ رَأً مِّنَ الْخِلَاطِ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الزُّيْنَ ءَا مَنُؤُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh dan amat sedikit mereka ini...(QS Shad, 38:24)

Akad *Musyarakah* ada empat macam :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah kepemilikan*, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti dan
- b. *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah „ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-„aqd* sendiri ada empat ( Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-„aqd* yang kelima ).
- c. *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al'Inan* , yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, kedalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini.
- d. *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang.
- e. *Syirkah al-a"mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan.
- f. *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Pola Sewa

### 1. Ijarah

*Ijarah*, yakni jual beli antara *mal* dengan manfaah. Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ada dua pihak yang terlibat dalam akad *Ijarah*, yaitu pemberi sewa (*mu"ajjir*) dan penyewa (*musta"jir*). Dasar –dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al- Ijma'.

- a) Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah

فَاءِ نَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاءَ ثَوْهْنٍ أَجُورَهُنَّ (الطلاق)

Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.” (Al-Talaq: 6).

- b) Dasar Hukum *Ijarah* Dari Al-Hadits

أَجْرَهُ فَلْيُعْمَلْ جِيراً أَجْرَ اسْتَأْمَنَ (هريرة أبي عمار الزرقادى)

Artinya : “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abdul Razaqdari Abu Hurairah).

### 2. Ijarah Al muntahiya bit- tamlik

*Ijarah Al muntahiya bit- tamlik* merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh



lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

## 2.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, antara lain :

### a) Perbedaan falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan bengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita diawal artikel ini. Sangat menguntungkan saya tetapi berakibat patal untuk banknya. Riba sangat berpotensi untuk mengakibatkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah kedua-duanya.

#### b) Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan maupun investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan sangat menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah yang membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pendapatan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias Cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banyaknya sama-sama berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan kedalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan atau disalurkan kedalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan kedalam berbagai usaha itulah yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan kepada dana nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut disalurkan kedalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya. Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah, semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

#### c) Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasikan dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

#### d) Struktur Organisasi

Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan



Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat membeikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sangsi.

**Tabel II.1**  
**Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Falsafah	Tidak berdasarkan: 1. Bunga 2. Spekulasi 3. Ketidakjelasan	Berdasarkan Bunga
Operasional	Dana diakui sebagai : 1. Titipan 2. Investasi Penyaluran untuk usaha yang halal dan menguntungkan	Dana diakui sebagai : Simpanan harus dibayar bunga penyaluran untuk sektor yang menguntungkan
Akad dan Aspek legalitas	Hukum Islam Dewan Pengawas Syariah	Hukum Positif
Dewan pengawas	terdiri dari BI,, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas	Dewan Pengawas Dewan pengawas terdiridari BI, Bapepam, Komisariss

	Syariah (DPS)	
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan kreditor
Tujuan	<i>Profit dan Falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Jual beli, Sewa	<i>Perangkat bunga</i>

sumber : Budisantoso (2014)

## 2.6 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Syafi'i Antonio (18:2011)

Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. Rivai dalam Purwanto (15;2011)

Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara makro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan (2) secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Muhammad dalam Sari (35;2013).

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pembiayaan produktif, untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan



produksi (2) pembiayaan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan atau investasi
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
  - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
  - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang .
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

## 2.7 Tujuan Pembiayaan

- (a) Didalam makalah tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah terkait dengan stake holder, yakni:
- (b) Pemilik: dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(c) Masyarakat: Pemilik dana, sebagai pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasi akan diperoleh bagi hasil. Debitur yang bersangkutan, dengan menyediakan dana baginya mereka membantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). Masyarakat umumnya-konsumen, mereka memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

(d) Pemerintah: akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

(e) Bank: bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

## 2.8 Pengertian Take Over

*Take over* adalah perpindahan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berhutang) kepada *muhil*. *Take over* menurut pasal 20 ayat 13 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menerima pemindahan hutang.

Dalam islam *take over* disebut dengan *hiwalah*, secara etimologi *hiwalah* berasal dari kata *halaasy-syai' haulan* yang memiliki arti pemindahan. Dalam





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akad *hiwalah* terdapat tiga pihak yang terkait, diantaranya adalah *muhal* (pemberi pinjaman), *muhil* (penerima pinjaman), dan *muhal alaih* (Penerima pemindahan pinjaman darimuhi). Sedangkan pengertian *hiwalah* secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafi, yang dimaksud *hiwalah* “Memidahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula”.
- b) Menurut Zainul Arifin “*hiwalah* adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak ke pihak lain, dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak yaitu pihak berutang (*muhil*), pihak yang memberi utang (*muhal*), dan pihak yang menerima pemindahan utang (*muhal' alaih*).

Menurut hanafi *hiwalah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a) *Hiwalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *muhal ala'ih* tidak punya utang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan kafalah dan harus ini dengan keridhoan ketiga pihak.
- b) *Hiwalah muqayyadah*, yaitu seorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada kepadanya. Inilah *hiwalah* yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

*Hiwalah* menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama.

Dalam mengaplikasikan akad *take over* (*hiwalah*) dalam produk perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak diantaranya yang diikat dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut, yaitu bank sebagai faktor, nasabah selaku klien, dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang pengertian *take over*, penulis dapat menyimpulkan bahwa *take over* merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang mana pihak penerima hutang bersedia menerima tanggungan dengan suka rela dan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah di buat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Pedoman Take Over di Bank Bni Syariah**

**1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002**

**Pertama : ketentuan umum**

1. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah
2. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati
3. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada lembaga keuangan konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS
4. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum dilunasi pembayaran kreditnya

**Kedua : ketentuan akad**

Akad pengalihan hutang ini dilakukan dalam empat alternatif, yaitu :

**Alternatif I**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit nya dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh nya kepada LKS
2. LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
3. Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh dan fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku dalam pelaksanaan akad pengalihan hutang sebagaimana alternatif I ini

**Alternatif II**

1. LKS membeli sebagian asset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dengan nasabah terhadap asset tersebut
2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
4. Fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku dalam pelaksanaan akad pengalihan hutang dalam alternatif II ini

**Alternatif III**

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2002
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
3. Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan yang dibeikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkannya angka 2

**Alternatif IV**

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
2. Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *al-qardh* nya kepada LKS
  3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*
  4. Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* dan DSN nomor 27/DSN-MUI/IV/2002 *al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* berlaku juga dalam akad pengalihan hutang pada alternatif IV ini

**Ketiga : ketentuan penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Konsep Pengalihan Hutang (*Take Over*) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) untuk semua bank syariah di Indonesia, perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang diterbitkan pada 17 maret 2008 menerangkan tentang pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*. Pada poin IV.2. diterangkan

1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* terdiri dari :
  - a) *Hiwalah mutlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan hutang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) bank, dan
  - b) *Hiwalah muqayyadah* adalah transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 pihak yang memiliki hubungan muamalat (utangpiutang) melalui transaksi pengalihan hutang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar dari bank.
2. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
  - a) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan hutang atas hutang nasabah kepada pihak ketiga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan dana pribadi nasabah;
  - c) Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* bagi nasabah yang abata lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan atau aspek usaha anatara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) dan prospek usaha (*condition*);
  - d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*;
  - e) Nilai pengalihan hutang harus sebesar nilai nominal;
  - f) Bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga;
  - g) Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah.
3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah muqayyadah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Ketentuan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* muthlaqah sebagaimana dimaksud pada poin b, kecuali angka 2, kecuali angka 1,6 dan 7;
- b) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan hutang atas hutang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki hutang kepada nasabah; dan
- c) Jumlah hutang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai hutang

## 2.9 Rukun dan Syarat *Take Over* (Hiwalah)

Pada sebuah perjanjian akad dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang menjadikan akad itu hahal menurut agama. Pada akad pengalihan hutang, rukun dan syarat terdiri dari :

### a) Rukun

- 1) *Muhil*/peminjam.
- 2) *Muhal*/pemberi pinjaman.
- 3) *Muhal'alaih*/penerima pemindahan utang.
- 4) *Muhal bihi*/utang, dan
- 5) Akad

### b) Syarat *hiwalah* menurut kompilasi hukum syariah

- 1) Para pihak yang melakukan akad *hiwalah*/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum (pasal 362).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peminjam harus memberi tahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
- 3) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjaman untuk memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad *hiwalah*/pemindahan utang.
- 4) Akad *hiwalah*/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *hiwalah*/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjaman ( pasal 363 ayat 1 s/d ayat 3).
- 5) *Hiwalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima pemindahan utang kepada pemindah utang.
- 6) Pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan (pasal 364 ayat 1 dan 2). Menurut Malik, perpindahan hutang itu mempunyai tiga syarat:
  - a) Orang yang dipindahkan hutangnya itu sudah jatuh tempo.
  - b) Utang yang dipindahkan itu sama dengan hutang yang baru dalam kadar dan sifatnya.
  - c) Hutang tersebut bukan dari pesanan.

#### c) Akibat *Hiwalah* ( *take over*)

- 1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima pemindahan utang.
- 2) Penjamin utang kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan (pasal 365 ayat 1 dan 2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

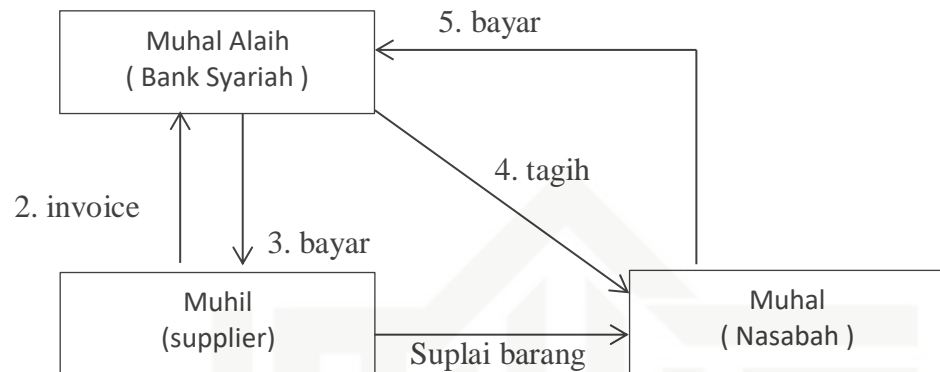
- 3) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangutangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
- 4) Pembayar utang kepada penerima pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan peminjam tidak mencukupi (pasal 366 ayat 1 dan 2).
- 5) Akad pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali pada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi (pasal 367).
- 6) Peminjam harus menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan (pasal 368).
- 7) Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti (pasal 369).
- 8) Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima pemindahan utang dibebaskannya (pasal 370).
- 9) Apabila terjadi pemindahan utang pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan (pasal 371).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Skema hiwalah ( Take Over )

Dibawah ini menampilkan sebuah skema hiwalah



**Gambar 2.1**  
**Skema hiwalah**

Keterangan:

1. *Muhil* menyuplai barang-barang kepada *muhal* (pembeli).
2. Setelah *muhal* mengirim barang kepada *muhal*, namun *muhal* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muhal* menyerahkan invoice kepada *muhal alaih*.
3. *Muhal alaih* membeli tagihan dari *muhal* dan melaksanakan pembayaran.
4. *Muhal alaih* melakukan penagihan kepada *muhal* yang didukung oleh invoice dari *muhal*.
5. Hasil penagihan berasal dari *muhal* diserahkan kepada *muhal alaih*.





## 2.10 Pengertian akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad berasal dari kata *Al-aqad* yang berarti *mengikat, menyambung menghubungkan*. Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggap terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karna akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

*Musyarakah Mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad *Musyarakah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. kata dasar dari *Musyarakah* adalah *Syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyrikusyarkan-syarikan-syirkatan*, yang berarti kerjasama. Menurut Sayyid sabiq *Musyarakah* atau *syirkah* merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan dari dua pihak, baik perusahaan maupun kelompok. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqishtanaqishan- mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.

*Musyarakah Mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset atau barang atau modal dari salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain.

*Musyarakah Mutanaqisah* disebut juga dengan *Musyarakah menurun* yaitu membolehkan partisipasi modal sebagai prioritas pertama dan berbagi untung berdasarkan prinsip bagi-hasil. Dengan sistem ini, Bank akan membayar uang lagi disamping bagian keuntungan Bank sebagai pembayaran kembali bagian modal



yang dipegang Bank. Dengan ini modal yang dipegang Bank makin lama makin berkurang seiring berjalannya waktu. Sesudah jangka waktu tertentu, Bank akan memiliki porsi modal nol dan pada saat itu kedudukannya sebagai mitra berhenti.

## 2.11 Tujuan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi Bank Unit Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam menerapkan produk pembiayaan berbasis akad Musyarakah Mutanaqishah. diharapkan dapat mengurangi risiko pada pembiayaan berbasis akad Musyarakah Mutanaqishah, mengingat risiko pembiayaan ini tergolong tinggi. Selain itu, diharapkan dapat memudahkan bagi otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan produk, dapat membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri serta kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya *market* memberikan *conduct* yang dapat memenuhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah.

## 2.12 Landasan Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam islam diperbolehkan, setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat islam. Dalam hal ini adapun landasan hokum akad *Musyarakah Mutanaqisah* adalah:

### a. Al – qur'an

- 1) Surat Shad ayat 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan hanya sedikitla mereka begitu.

Maksud ayat diatas yaitu seolah mencela perilaku orang-orang yang bekerjasama atau bersyarikat dalam dagang dan menzhalimi sebagian dari mitra kerja mereka, ayat ini menjelaskan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah terdahulu dan telah dipraktekkan namun harus sesuai dengan hukum allah SWT

#### 2) Surat Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang beriman penuhilah akad-akad mu.

Ayat ini memberikan ketegasan kepada umat manusia yang berkongsi dalam kebaikan untuk memenuhi segala aturan mengenai akad (perjanjian) dan tidak boleh mengingkarinya jika telah berjanji agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan atau perselisihan yang menghancurkan umat manusia itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ  
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini merupakan salah satu dasar hukum dari *ijarah* yang menjadi bagian dari *akad Musyarakah Mutanaqisah*. Allah telah memberikan hukum kepada manusia bahwa memberikan pembayaran karena mengambil manfaat dari orang lain tidak dilarang dan tidak berdosa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Hadist Rasulullah SAW**

1) HR. Abu Hurairah RA

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : *Dari abu Hurairah radiyalallahua'anhu bahwa rasulullah saw bersabda: "Allah berfirman: 'aku adalah aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.'" ( HR Abu Daud Yang shahihkan oleh Al-hakim dari abu hurairah)*

2) HR. Tirmidzi dan Amr Bin Auf

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حَرًّا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حَرًّا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حَرًّا

Artinya: *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*

3) HR. Ibn Majah dari Ibn Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْفَ عَرَفَهُ

Artinya : *" berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"*

Hadist ini menegaskan bahwa menyewa atau memanfaatkan tenaga dari buruh atau pekerja adalah diperbolehkan, namun tidak boleh menyingkarkan kewajiban untuk membayar sewa atas atas manfaat tersebut, bahkan kewajiban untuk membayar sewa harus dilunasi sebelum keringatnya kering.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) HR. Abu Saad bin Abi Waqqash tentang sewa menyewa

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِلَمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَّا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan emas atau perak”.

c. Ijtihad

- 1) Dasar Ijtihad bagi Perbankan dan produk perbankan syariah di Indonesia dilegitimasi dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk Musyarakah Mutanaqisah DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI NO.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, adapun ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain:

**Pertama:** Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- c. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya’

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Musya' )adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batasbatasnya secara fisik.

**Kedua:** Ketentuan Hukum.

Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

**Ketiga:** Ketentuan Akad yang diatur dalam Fatwa ini antara lain:

- a. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual-beli).
- b. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
  1. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
  2. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
  3. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
- c. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.
- d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan sesuai kesepakatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshahLKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

#### **Keempat: Ketentuan Khusus**

- a. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain.
- b. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan.
- d. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
- e. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.
- f. Biaya perolehan asset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

#### **Kelima :Penutup**

Jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah





### 2.13 Rukun dan syarat akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

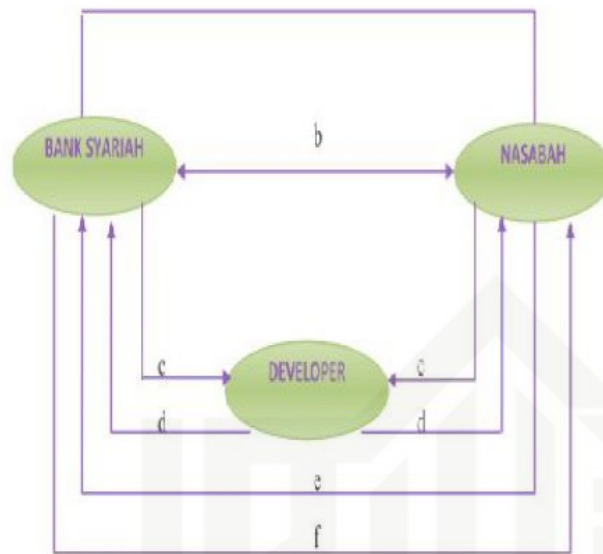
Di dalam akad ini terdapat unsur *Syirkah* (kerjasama) dan *ijarah* (sewa). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal dan kepemilikan akan barang, sementara sewa adalah kemudahan yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Rukun dan syarat dalam *Musyarakah Mutanaqisah* merupakan gabungan kedua akad tersebut. Berkaitan dengan *Syirkah* Menurut jumhur ulama, rukun akad *Musyarakah* ada tiga yaitu: *shigat* (ijab dan qabul), kedua orang yang berakad, dan objek akad. Syarat pokok musyarakah anatara lain: akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, dan keterpaksaan. Selain itu kedua belah pihak harus mempercayai satu sama lain terkait kesepakatan tersebut. Pencampuran modal, merupakan pencampuran hak masingmasing dalam kepemilikan objek akad.

Berkaitan dengan unsur sewa, rukun dari *Ijarah* meliputi: penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*), *shighat* (ucapan kesepakatan), *ujrah* (*fee*), dan barang/benda yang disewakan (*ma'jur*), harga sewa, dan adanya perjanjian. Sedangkan syaratnya yaitu kesepakatan kedua belah pihak, barang yang disewa tidak haram dan yang menjadi obyek kontrak dalam *Ijarah* adalah Manfaat dari penggunaan asset bukan asset itu sendiri.

### 2.14 Skema Pembiayaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Kita lihat bagan alur pembiayaan musyarakah mutanaqishah dibawah ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.2

### Skema 1 Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah

Keterangan:

- a) Negoisasi angsuran dan sewa
- b) Akad kerjasama
- c) Beli barang, bisa bank atau nasabah
- d) Mendapat berkas dan dokumen
- e) Nasabah membayar angsuran sewa
- f) Lembaga keuangan syariah menyerahkan hak kepemilikannya.

Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* untuk pengadaan suatu barang, yakni: *tahap pertama*, Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan/pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan perbulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang tersebut. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan telah ditentukan dalam pembiayaan syariah. *Tahap kedua*, Petugas lembaga keuangan syariah biasa disingkat LKS akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif atau kuantitatif. *Tahap ketiga*, Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka LKS menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (offering letter) yang didalamnya adalah (a) Spesifikasi barang yang disepakati, (b) Harga barang, (c) Jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan, (d) Jangka waktu pelunasan pembiayaan, (e) Cara pelunasan (model angsuran), (f) Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah. *Tahap kedua*, Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam offering letter tersebut, maka pihak LKS dan/atau nasabah dapat menghubungi distributor agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya. *Tahap Ketiga*, Kemudian yang terakhir dilakukan akad musyarakah mutanaqishah antara LKS dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya.

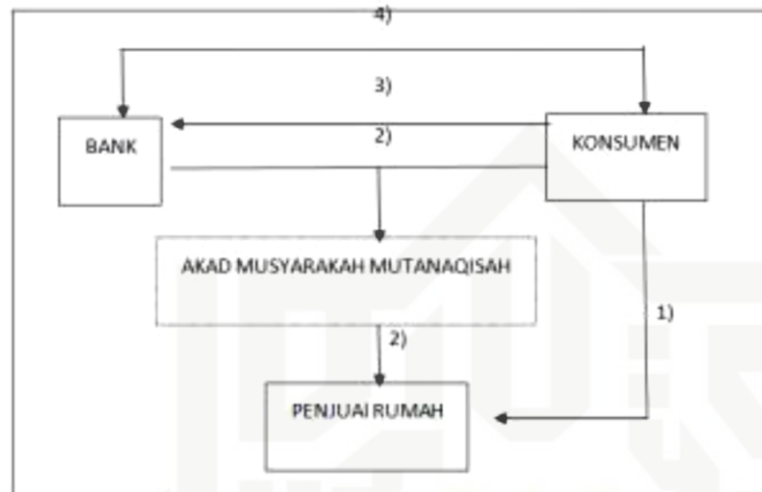
Penyerahan barang dilakukan oleh distributor/agen kepada LKS dan nasabah, setelah LKS dan nasabah, melunasi harga pembelian barang kepada distributor/agen. Setelah barang diterima LKS dan nasabah, pihak LKS akan melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah disepakati.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.3**

#### **Skema 2 Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah**



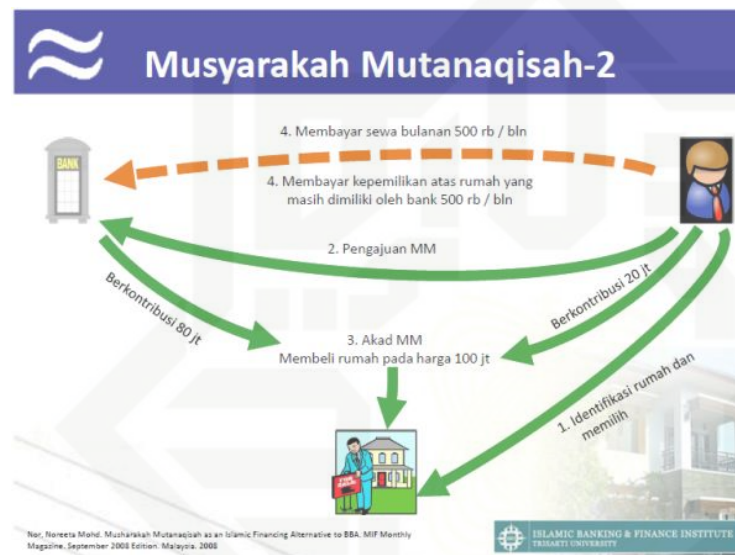
Misal Perhitungan dari skema diatas dapat digambarkan didalam contoh berikut. Misalkan penjual rumah hendak menjual rumahnya di harga Rp.100,000,000. Dan adaseorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan mengajak Bank A untuk bermitra melalui akad MM. Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah dimana Bank A harus mengadakan perjanjian kemitraan (Musyarakah) dengan pembeli B untuk membeli rumah. Misalkan Bank A membeli rumah dengan harga Rp.80,000,000 dan pembeli B membayar rumah tersebut pada harga Rp.20,000,000. Maka proporsi kepemilikan rumah tersebut adalah 80% Bank A, dan 20% adalah konsumen. Dan setiap bulannya, pembeli B akan melakukan pembelian kepemilikan dari Bank A sebesar Rp.500,000. Kontrak yang berikutnya adalah kontrak Ijarah diantara Bank A dengan pembeli B, dimana pembeli B melakukan pembayaran sewa kepada Bank A setiap bulannya, misalkan pada harga Rp.500,000. Dari Rp.500,000 ini, akan dibagi



berdasarkan proporsi kepemilikan. Jika proporsi Bank A 80%, maka dari uang sewa yang pertama, bank akan mendapat upah sewa sebesar Rp. 400,000. Dan konsumen akan mendapat Rp. 100,000, dengan proporsi kepemilikan hanya 20%

Gambar 2.4

### Musyarakah Mutanaqisah



### 2.15 Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*

Ada beberapa kelebihan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* antara lain :

- LKS dan nasabah samasama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama maka antara LKS dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut.
- Adanya bagi hasil yang diterima antara kedu belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut.
- Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar.

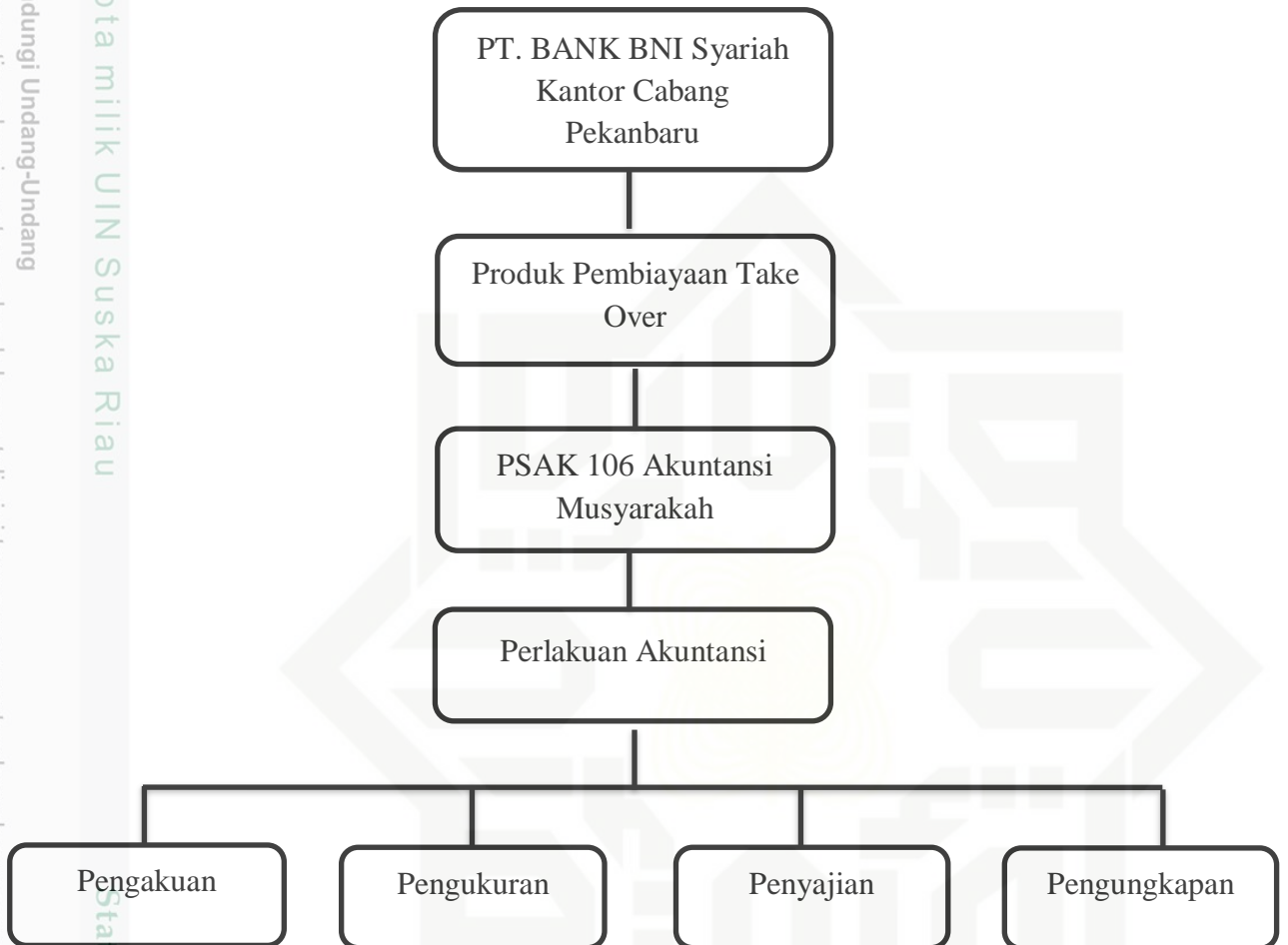
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional.
- e. Tidak terpengaruh pada terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, dan atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.

Kemudian ada beberapakelemahan yang muncul dalam akadmusyarakah mutanaqishah ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah risiko terjadinyaapelimphan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin akan menjadi beban atas asset tersebut, dan berkurangnya pendapatan LKS atas margin sewayang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad.

## 2.16 Kerangka Konseptual



Sumber : Pengembangan Penulis 2020

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.484. Penulis memilih bank BNI Syariah KC Pekanbaru karena bank BNI Syariah KC Pekanbaru merupakan lembaga keuangan perbankan syariah yang menjalankan prinsip – prinsip syariah pertama di Indonesia. Selain itu bank BNI Syariah juga mampu berkembang pesat di kota Pekanbaru dengan memberikan pelayanan Take Over untuk KPR dan Multijasa.

Berdasarkan judul yang diangkat penulis maka dapat dilihat bahwa metode yang digunakan yaitu metode *deskriptif kualitatif*. Menurut Saryono (2010:67), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dimana metode penelitian *Deksriptif Kualitatif* ini tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penelitian yang diperoleh hasil data tertulis dalam bentuk angka –angka maupun data dokumentasi lainnya, akan tetapi penulis juga melakukan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak bank khususnya bagian yang berkaitan dengan pembiayaan dan kemudian penulis menganalisis data hasil wawancara tersebut dengan metode *deksriptif kualitatif*.





### 3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari wawancara dan konsultasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak bank yang berwenang untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti.
2. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan yang relevan dengan penelitian seperti dokumen-dokumen yang berupa laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan Take Over Akad

*Musyarakah Mutanaqisah*



### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dengan cara melakukan pengolahan data yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai perlakuan akuntansi terhadap Pembiayaan Take Over akad *Musyarakah Mutananqishah*, adapun langkah - langkah yang ditempuh:

1. Mengumpulkan data – data , catatan – catatan atas dokumentasi terkait dengan PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ( laporan Take Over dan lain – lain) baik yang bukan langsung dari sumbernya atau yang langsung dari sumbernya.
2. Menganalisa kondisi perusahaan baik dari stuktur organisasi, kebijakan – kebijakan perusahaan, serta hal – hal yang berhubungan dengan Pembiayaan Take Over akad *Musyarakah Mutananqishah*, Khususnya perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan dan merelevansasikan dengan teori yang terkait seperti PSAK dan lain – lain.
3. Memberikan solusi dan alternative pemecahan masalah jika dilakukan selama analisa terdapat kesalahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang telah di uraikan diatas yang mengacu pada Tujuan Penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi pembiayaan Take Over akad *Musyarakah Mutanaqishah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru terhadap Pengakuan dan Pengukuran mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan telah sesuai dengan PSAK 106 Akad *Musyarkah*.
2. Perlakuan Akuntansi pembiayaan Take Over akad *Musyarakah Mutanaqishah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru terhadap Pengungkapan telah sesuai denagn PSAK No. 106 Akad *Musyarakah*.
3. Perlakuan Akuntansi pembiayaan Take Over akad *Musyarakah Mutanaqishah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru terhadap Penyajian belum sesuai dengan PSAK 106 Akad *Musyarkah*.



## 5.2 Hambatan

Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian, yaitu PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru tersebut merupakan kantor cabang, namun laporan keuangan yang diijinkan untuk dijadikan bahan penelitian terbatas pada laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 yang telah dipublikasikan di website [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id).

## 5.3 Saran

1. Perlakuan akuntansi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru terhadap pembiayaan *Musyarakah* mulai dari awal terealisasinya akad pembiayaan sampai akhir akad pembiayaan semuanya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah baik, tapi masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 106, yaitu mencatat dan menyajikan pembiayaan sebagai piutang musyarakah. Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 35 realisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan musyarakah dicatat dan disajikan sebagai investasi Musyarakah bukan piutang *Musyarakah*. jadi untuk lebih baiknya, disarankan bagi pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan PSAK No.106
2. Peneliti sekarang memiliki keterbatasan tentang teori sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi. Jadi disarankan bagi peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang perlakuan



akuntansi agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, selain itu peneliti selanjutnya juga bisa mempertimbangkan produk pembiayaan lain selain musyarakah murabahah, mudharabah dan lain-lain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Departemen Agama RI, 2017 ).
- Antonio, Muhammad Syafi. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*. Yogyakarta: PT Gema Insani Pers dan Tazkia Cendikia.
- Buchori ,Ahmad. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta.
- Data Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ( 2019 )
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. h. 117– 121
- Dr. Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana,. h. 268.
- Fatwa DSN-MUI No : 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah
- Fatwa DSN-MUI No : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* Dalam Produk Pembiayaan.
- Fatwa DSN MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, h. 62.
- Huda, Nurul dan Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpretama.
- Imronah, Ainul. 2018. *Musyarakah Mutanaqishah*. AL-INTAJ 4: 1. Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam.
- Ismail. 2013, *Perbankan Syariah*, edsi ke dua Yogyakarta, Kencana PrenadaMedia group.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers Edisi Pertama, Cet. 2.
- Muhammad, Rifqi. 2013. *Teori & Praktek untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: P3EI FE UII.
- Nadrattuzaman Hosen, M, dkk. 2011. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah).
- Purwanto. 2011. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, Al-Faifi. 2010. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam, Jilid 2, h. 269
- Sumsr'in. 2012. *Konsep kelembagaan bank syariah*. Ed.1. cet. 1. Yogyakarta : Graha Ilmu. h. 14.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Tim Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 141
- Thamrin, Abdullah. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.156–57.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wangsawidjaya Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan pihak SME Ao PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, tanggal 10 Desember 2020 pukul 13:00 wib.
- Wawancara dengan pihak SME Ao PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, tanggal 22 April 2021 pukul 10:00 wib.
- <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>, diakses pada tanggal 1 desember 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU





## LAMPIRAN 1

### HASIL WAWANCARA 1

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021**

**Tempat / Waktu : 10.00 wib**

**Narasumber : Ibu Yolanda**

**Jabatan : SME AO BSI**

**Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Take Over Akad Musyarakah Mutanaqisah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru**

**Pertanyaan Peneliti :**

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Alur Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?
2. Bagaimana Metode Pencatatan Yang Digunakan Oleh PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?
3. Apa Saja Standar Akuntansi Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan di PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?
4. Bagaimana Pengertian Musyarakah Mutanaqisah Menurut PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?
5. Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Dari Akad Musyarakah Mutanaqisah PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?

**Jawaban narasumber**

1. nasabah yang ingin melakukan pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru bisa datang langsung ke bank nya dek di jl. Jendral Sudirman no. 484. Mengajukan pembiayaan Bni Syariah membagi dua jenis nasabah pertama nasabah atas nama perorangan, kedua nasabah atas badan usaha baik berbadan hukum seperti CV dan Perseroan (



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PT ). Setelah itu untuk nasabah pembiayaan konsumtif dapat mengisi formulir pengajuan pembiayaan menyerahkan legalitas diri seperti KTP, KK, NPWP, Surat Nikah, Legalitas Usaha , legalitas jaminan, rekening koran usaha enam bulan terakhir, dan data terkait penghasilan lainnya, seperti gaji, tunjangan dan remonisasi. Jika nasabah berasal dari badan usaha maka nasabah harus mengajukan surat permohonan pembiayaan menyerahkan fotocopy legalitas perusahaan seperti akta pendirian, akta perubahan, perizinan perusahaan, laporan keuangan perusahaan, legalitas pengurus perusahaan, legalitas jaminan, rekening koran satu tahun terakhir dan data terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Setelah persyaratan dianggap lengkap maka jaminan atau objek Musyarakah Mutanaqisah akan dinilai. Jika objek pengajuan nasabah diatas 5 miliar maka menggunakan jasa appraisal independen, jika pengajuan pembiayaan dibawah 5 miliar maka menggunakan appraisal Bni Syariah. Setelah dinilai nasabah akan dianalisa apakah nasabah layak diberikan pembiayaan. Jika nasabah layak ( Bankable) maka akan diterbitkan surat keputusan pembiayaan (SKP). SKP berisi tentang syarat – syarat yang mengatur maupun yang mengikat terhadap pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Apabila nasabah telah menyetujui syarat – syarat yang tercantum dalam SKP maka selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan Akad Mmq dan selanjutnya akan dilakukan realisasi pembiayaan yaitu pembelian porsi asset nasabah. Apabila nasabah tidak layak dibiayai maka bank akan mengeluarkan surat penolakan. (Ibu Yolanda , 22 April 2021)

2. Metode yang kita gunakan saat ini sebenarnya sama dengan bank bank lain yaitu dengan accrual basis yaitu dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. (ibu yolanda , 22 april 2021)
3. standar yang kita gunakan dalam meyusun laporan keuangan pada PT. . Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yaitu kita menggunakan standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dan Fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008 yaitu sebagai acuan kita terhadap sebuah perbankan di Indonesia.(Ibu Yolanda , 22 April 2021)

4. Pengertian pembiayaan musyarakah mutanaqishah menurut saya yaitu. Suatu jenis pembiayaan yang dimana terjadi pembelian sebagian porsi asset nasabah yang digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan syariah dimana muncul kewajiban sewa dan kewajiban bagi hasil antara bank dan nasabah pada akhir pembiayaan porsi nasabah akan bertambah sehingga kepemilikan asset akan kembali 100% kepada nasabah (Ibu Yolanda , 22 April 2021)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL WAWANCARA 2

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Hari / Tanggal : Kamis, 26 April 2021**

**Tempat / Waktu : 10.00 wib**

**Narasumber : Pak Andri Altri Putra**

**Jabatan : SME AO BSI**

**Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Take Over Akad Musyarakah Mutanaqisah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru**

**Pertanyaan Peneliti :**

1. Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Dari Akad Musyarakah Mutanaqisah PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?
2. Apa Saja Langkah Yang Dilakukan Pihak Bank Apabila Pengakuan Dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian ?
3. Dan Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Pada Saat Berakhir Akad Musyarakah Mutanaqisah di PT. Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru ?

**Jawaban Narasumber**

1. kelebihan akad MMQ adalah porsi asset yang dibeli oleh bank yang realisasinya berbentuk uang tunai dapat digunakan untuk segala keperluan nasabah sesuai dengan syariah, contoh seperti digunakan untuk digunakan investasi, modal kerja, modal jasa (kelebihan MMQ dari sisi nasabah ). ( kelebihan mmq dari sisi bank ) adalah akad mmq bersifat sewa sehingga bank dapat melakukan review atas sewa tersebut baik dalam bentuk menaikkan sewa ataupun menurunkan sewa. Selain itu mmq mempunyai kelebihan tidak terpengaruh terhadap suku bunga.” (Pak Andri Altri Putra, 26 April 2021) Adapun kekurangannya kalau di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Sendiri masih jarang orang melakukan pembiayaan dengan akad





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

musyarakah masih kalah dengan murabahah karena sosialisai terhadap akad mmq ini masih belum optimal dari sisi perbankan hampir banyak belum menguasai produk mmq. (Pak Andri Altri Putra, 26 April 2021)

2. Langkah – langkah yang dilakukan Bank jika terjadi kerugian pertama yang dilakukan bank yaitu akan menganalisis sebab yang terjadinya kerugian , ada dua factor yang menyebabkan kerugian yaitu factor force major dan kelalian nasabah jika factor force major ( faktor yang tidak diinginkan) seperti bencana alam, kebakaran, dan lainnya. Jika terjadi kerugian karena factor teersebut maka bank akan bertanggung jawab terhadap kerugian sesuai porsi bank yang didudukan dalam akad mmq dan bank juga memberikan kelapangan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran. Dan jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Piutang musyarakah xxx

Kr. Kerugian bagi hasil musyarakah xxx

“ Jika factor kelalaian nasabah maka nasabah harus bertanggung jawab terhadap kerugian ini, Karena pada saat analisa awal bank akan menerapkan system yang sangat selektif dan memproyeksikan segala bentuk resiko yang muncul dan memitigasinya”. jurnalnya sebagai berikut

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang xxx

Kr. Pembiayaan (dengan no. rek yang dihapuskan) xxx

(Pak Andri Altri Putra, 26 April 2021)

3. “pada saat MMQ nasabah akan diberikan jangka waktu pembiayaan nasabah juga diberikan tabel angsuran mmq, tabel angsuran tersebut berisi informasi tentang porsi sewa bank dan porsi sewa nasabah. Porsi sewa nasabah disamakan dengan pembayaran pokok, sedangkan porsi sewa bank disamakan dengan pembayaran bagi hasi,l total sewa perbulan sama dengan total angsuran. Apabila pembiayaan mmq akan lunas maka total pembayaran porsi sewa nasabah akan mengembalikan porsi kepemilikan aset nasabah sehingga aset yang menjadi objek pembiayaan mmq akan kembali menjadi milik nasabah.

*Maka objek mmq yang menjadi jaminan pembiayaan akan dilakukan pelepasan hak tanggungan dan dikembalikan dengan nasabah” (Pak Andri Altri Putra, 26 April 2021)*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penciptaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### LAMPIRAN 3

#### Pembandingan Pembiayaan

#### Pt.Bank Bni Syariah Kc Pekanbaru

NO.		SUB CATEGORY	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	815	Murabahah	1259	1271	1177	1193	1306
2	815	Ijaroh Multijasa Konsumtif	161	122	48	9	14
3	815	Modal kerja Syariah Mudharabah Mudharabah Mutlaqah	1	2	49	38	26
4	815	Modal kerja Syariah Musyarakah	22	24	32	41	49
5	815	Musyarakah Mutanaqisah	0	0	1	2	8

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 4

### PT. BANK BNI SYARIAH Laporan Neraca Per Kantor Bni Syariah Periode 2020

SANDI	AKTIVA/PASIVA	SALDO VALAS DALAM RUPIAH	SALDO DALAM RUPIAH	SALDO GABUNGAN
1	KAS & BANK	-307.695.000,00	-3.821.463.200,00	-4.129.158.200,00
1,1	PNMPTN DANA,SB YG DIBELI & DG REPO JUAL	0,00	0,00	0,00
1,2	TAG.DOK/FAS & PIUTANG SYARIAH	0,00	-239.222.126.704,46	-239.222.126.704,46
1,3		0,00	0,00	0,00
1,4	PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN	0,00	-38.066.682.586,82	-38.066.682.586,82
1,5	TAGIHAN AKSEPTASI	0,00	0,00	0,00
1,6	AKTIVA PRODUKTIF SYARIAH LAINNYA	0,00	-489.559.965,38	-489.559.965,38
1,7		0,00	0,00	0,00
1,8	AKTIVA TETAP	0,00	-2.153.234.336,77	-2.153.234.336,77
1,9	AKTIVA LAIN-LAIN	-3.253.687.057,50	-342.641.741.198,31	-345.895.428.255,81
	TOTAL AKTIVA	-3.561.382.057,50	-626.394.807.991,74	-629.956.190.049,24
6,1	REKENING KOMITMEN DEBET	0,00	0,00	0,00
6,2	REKENING KONTINJENSI DEBET	0,00	-2.382.441.779,00	-2.382.441.779,00
6,5	PIUTANG/PEMBIAYAAN YANG DIHAPUSBUKUDEBET	0,00	-21.162.762.415,00	-21.162.762.415,00
6,9	REKENING PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



	KELOLAAN DEBET			
8,1	REKENING MEMORIAL DEBET	0,00	-75.348.962,00	-75.348.962,00
8,9	REKENING MEMORIAL DEBET PEMBIAYAAN KELOLAAN	0,00	0,00	0,00
2	KEWAJIBAN SEGERA	24.447,00	231.171.968,00	231.196.415,00
2,1	SIMPANAN PIHAK KETIGA	1.330.270.579,00	293.651.009.611,71	294.981.280.190,71
2,2	SURAT BERHARGA YG DIJUAL DG REPO BELI	0,00	0,00	0,00
2,3		0,00	0,00	0,00
2,4	KEWAJIBAN AKSEPTASI & HUTANG SYARIAH	0,00	0,00	0,00
2,5	SB YG DITERBITKAN & PINJ YG DITERIMA	0,00	0,00	0,00
2,6		0,00	0,00	0,00
2,7	KEWAJIBAN ESTIMASI	0,00	554.400,00	554.400,00
2,8	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	117.036,50	369.145.290,40	369.262.326,90
2,9	PEMBIAYAAN SUBORDINASI	2.230.969.995,00	331.750.768.382,00	333.981.738.377,00
3,1	MODAL DISETOR	0,00	0,00	0,00
3,2	TAMBAHAN MODAL DISETOR	0,00	0,00	0,00
3,3	SALDO LABA/RUGI	0,00	392.158.339,63	392.158.339,63
	TOTAL PASIVA	3.561.382.057,50	626.394.807.991,74	629.956.190.049,24
7,1	REKENING KOMITMEN KREDIT	0,00	0,00	0,00
7,2	REKENING KONTINJENSI KREDIT	0,00	2.382.441.779,00	2.382.441.779,00
7,5	PIUTANG/PEMBIAYAAN YG DIHAPUSBUKU KREDIT	0,00	21.162.762.415,00	21.162.762.415,00
7,9	REKENING PEMBIAYAAN KELOLAAN KREDIT	0,00	0,00	0,00
9,1	REKENING MEMORIAL KREDIT	0,00	75.348.962,00	75.348.962,00
9,9	REKENING MEMORIAL KREDIT PEMBIAYAAN KELOLAAN	0,00	0,00	0,00

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## LAMPIRAN 5

### PT. BANK BNI SYARIAH Laporan L/R Per Kantor Bni Syariah Periode 2020

SANDI	NAMA REKENING	SALDO VALAS DALAM RUPIAH	SALDO DALAM RUPIAH	SALDO GABUNGAN
4,1	PENDAPATAN BAGI HASIL DAN OPERASI UTAMA	0,00	29.021.368.431,13	29.021.368.431,13
4,2	PENDAPATAN ADMINISTRASI SYARIAH	0,00	336.229.070,00	336.229.070,00
4,3	KEUNTGN/KRG TRANSAKSI SURAT BERHARGA	0,00	0,00	0,00
4,4	KEUNTGN/KRG TRANSAKSI VALAS	0,00	-29.051.114,00	-29.051.114,00
4,8	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	0,00	1.071.994.214,50	1.071.994.214,50
4,9	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN	0,00	30.400.540.601,63	30.400.540.601,63
5,1	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DAN BONUS	0,00	-6.484.525.007,40	-6.484.525.007,40
5,2	BEBAN ADMINISTRASI	0,00	0,00	0,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



5,3	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN	0,00	-11.675.844.455,50	-11.675.844.455,50
5,5	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	0,00	-11.282.230.107,00	-11.282.230.107,00
5,6	KERUGIAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA	0,00	0,00	0,00
5,7		0,00	-890.000,00	-890.000,00
5,8	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	0,00	-401.473.084,10	-401.473.084,10
5,9	BEBAN NON OPERASIONAL	0,00	-163.419.608,00	-163.419.608,00
	TOTAL BIAYA	0,00	-30.008.382.262,00	-30.008.382.262,00

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



## LAMPIRAN 6

### PT. BANK BNI SYARIAH Laporan Posisi Keuangan Periode 2019 – 2020

(Dalam Ratusan Juta Rupiah)

POS-POS	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
A. PENDAPATAN PENYALURAN DANA	40148	2850	5700	8196	10422	12374	14401	16791	19137	21404	23771	26215	28860
1. Pendapatan Margin Piutang Murabahah	35115	2505	5191	7535	9548	11346	13025	15208	17303	19427	21617	23912	26150
2. Pdpt Sewa Ijarah Bersih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pdp Ijarah Multi Jasa	59	6	11	17	23	29	34	40	46	51	58	64	71
4. Pdp Pokok IMBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pendpt. Bagi Hsl Pembiayaan Mudharabah	288	18	34	48	62	75	87	98	108	118	126	134	141
6. Pendpt. Bagi Hsl Pembiayaan Musyarakah	4676	317	452	577	762	888	1208	1387	1613	1732	1883	2008	2391
7. Pendapatan Dari Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pendapatan Bonus SBIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pendapatan Penempatan Dana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau perbaikan terjemahan, atau untuk keperluan hukum yang sah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

10. Pendapatan Penempatan Surat Berharga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pdpt Fee Rahn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pdpt Fee Anjak Piutang	10	5	11	19	28	38	47	57	67	77	87	97	108
13. Pdpt Opr. Hasanah Card	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. BEBAN BAGI HASIL</b>	<b>6832</b>	<b>560</b>	<b>1162</b>	<b>1712</b>	<b>2264</b>	<b>2826</b>	<b>3329</b>	<b>3805</b>	<b>4337</b>	<b>4866</b>	<b>5365</b>	<b>5890</b>	<b>6485</b>
1. Beban Bonus/Bagi Hasil Nasabah Giro	143	10	24	37	50	61	72	82	96	110	121	133	144
2. Beban Bonus/Bagi Hasil Nasabah Tabungan	1868	150	308	455	606	761	898	1023	1167	1307	1436	1573	1730
3. Beban Bagi Hasil Nasabah Deposito	4821	400	830	1220	1608	2003	2359	2700	3074	3448	3808	4184	4610
4. Beban Bagi Hasil Surat Berharga Yang Diterbitkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beban RAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. PENDAPATAN SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (A - B)</b>	<b>33316</b>	<b>2290</b>	<b>4538</b>	<b>6484</b>	<b>8159</b>	<b>9548</b>	<b>11073</b>	<b>12986</b>	<b>14800</b>	<b>16539</b>	<b>18406</b>	<b>20325</b>	<b>22376</b>
<b>D. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>1853</b>	<b>138</b>	<b>176</b>	<b>60</b>	<b>352</b>	<b>468</b>	<b>605</b>	<b>686</b>	<b>788</b>	<b>920</b>	<b>1057</b>	<b>1224</b>	<b>1346</b>
1. Pendapatan Fee Based	1853	138	176	60	352	468	605	686	788	920	1057	1224	1346



2. Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. BEBAN OPEX</b>	<b>11112</b>	<b>656</b>	<b>1618</b>	<b>2653</b>	<b>3649</b>	<b>4567</b>	<b>5459</b>	<b>6409</b>	<b>6967</b>	<b>8007</b>	<b>8890</b>	<b>9753</b>	<b>10817</b>
1. Beban Premi	45	17	23	29	32	36	38	41	44	47	49	53	55
2. Beban Tenaga Kerja	5202	436	906	1405	1994	2497	2958	3462	3968	4593	5137	5637	6184
3. Beban Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beban Penelitian dan Pengembangan	9	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5. Beban Sewa	1214	75	186	307	414	534	650	767	471	523	562	610	674
6. Beban Promosi	196	15	36	47	47	78	82	89	103	114	116	127	155
7. Pajak - Pajak (Tidak termasuk pajak penghasilan)	53	3	17	19	21	24	26	27	37	39	41	43	66
8. Pemeliharaan dan Perbaikan aktiva tetap dan Inventaris	439	25	47	99	115	134	152	176	196	229	245	264	298
9. Penyusutan aktiva tetap dan inventaris	87	9	20	31	41	51	62	73	84	94	105	117	141
10. Biaya yang ditangguhkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lainnya	3868	76	381	715	984	1211	1491	1772	2061	2366	2632	2901	3242
<b>F. LABA/RUGI OPERASIONAL (C + D - E)</b>	<b>24057</b>	<b>1771</b>	<b>3096</b>	<b>3890</b>	<b>4861</b>	<b>5449</b>	<b>6218</b>	<b>7262</b>	<b>8621</b>	<b>9451</b>	<b>10572</b>	<b>11796</b>	<b>12905</b>
<b>G. BEBAN PKAP</b>	<b>2001</b>	<b>242</b>	<b>951</b>	<b>848</b>	<b>919</b>	<b>1880</b>	<b>4650</b>	<b>3761</b>	<b>4371</b>	<b>3993</b>	<b>3881</b>	<b>11235</b>	<b>11669</b>
1. Penyisihan Penghapusan Penempatan Dana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau penyebaran informasi.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2. Penyisihan Penghapusan Surat Berharga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Penyisihan Aktiva Ijarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Penyisihan Piutang Ijarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Penyisihan Penghapusan Piutang Murabahah	2295	663	1393	1318	478	1442	4281	4661	5247	5744	5651	11751	12238
6. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan Mudharabah	-11	-1	-3	-3	-4	-5	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10
7. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan Musyarakah	557	-418	-427	-431	485	486	468	-796	-767	-805	-811	456	433
8. Penyisihan Penghapusan Piutang Qard	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
9. Penyisihan Penghapusan Tagihan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Penyisihan Penghapusan TRA Administratif	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11. Recovery	-837	-1	-13	-36	-41	-44	-93	-98	-102	-938	-950	-963	-993
H. LABA/RUGI OPERASIONAL SETELAH PKAP (F - G)	22056	1529	2145	3043	3943	3569	1568	3501	4250	5458	6691	561	1237



I. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. BEBAN NON OPERASIONAL	135	5	40	65	68	70	85	92	124	142	155	160	164
K. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (I - J)	-135	-5	-40	-65	-68	-70	-85	-92	-124	-142	-155	-160	-164
L. BEBAN CSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M. ZAKAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (H + K - L - M)</b>	<b>21921</b>	<b>1524</b>	<b>2105</b>	<b>2978</b>	<b>3875</b>	<b>3500</b>	<b>1483</b>	<b>3410</b>	<b>4127</b>	<b>5316</b>	<b>6536</b>	<b>401</b>	<b>1072</b>

1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarag mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



## SURAT KETERANGAN

**No. 01/595-3/8019**

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
KC Pekanbaru Sudirman 2  
Jl. Jend. Sudirman No. 484  
Pekanbaru - Riau, 26126  
Indonesia  
T : +62 21 859694, 859695  
F : +62 21 859819  
www.bankbsi.co.id

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Rio Aldi Saputra  
**NIM** : 11773100332  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Universitas** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan penelitian guna melengkapi data untuk bahan Tugas Akhir Perkuliahan di PT. Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Sudirman 2 dengan judul :

**"Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Take Over Akad Musyarakah Mutannaqishah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT Bank BNI Syariah "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2

  
**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA

**Rino Irzan**  
Branch Operation Service Manager

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rio Aldi Saputra
Alamat	: Jl. Kaharuddin Nasution
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 26 Februari 1999
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Bangsa	: Indonesia
Agama	: Islam
No Hp/ Email	: 082170058905/ <a href="mailto:rio260299@gmail.com">rio260299@gmail.com</a>
Motto	: “ Tidak Ada Pekerjaan Yang Berat Di Dunia Ini. Pekerjaan Seberat Apapun Terasa Ringan Bila Tidak Dikerjakan”



Riwayat Pendidikan :

1. SDN 038 Pekanbaru, Lulus Tahun 2012
2. MTSN Bukit Raya Pekanbaru, Lulus Tahun 2014
3. SMA PGRI Pekanbaru, Lulus Tahun 2017
4. UIN Suska Riau, Lulus Tahun 2021

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Pramuka UIN Suska Riau ( 2017-2018)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarbenarnya.

Pekanbaru, Juli 2021  
Hormat saya,

**Rio Aldi Saputra**  
**NIM. 11773100332**